



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) T.A 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km.5 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kode Pos 27573
Website : diskominfo.dharmasrayakab.co.id, email : diskominfo@dharmasrayakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan ini.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja atas upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021. Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2021 yang disusun berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Segenap kemampuan, gagasan dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing dengan hasil kinerja seperti yang tertuang dalam laporan ini.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja bagi internal Dinas Komunikasi dan Informatika, dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Melalui Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini pula, diharapkan dapat diketahui perkembangan kebijakan di komunikasi dan informatika dan dapat memberikan umpan balik berupa saran dan masukan konstruktif demi penyempurnaan pembangunan komunikasi dan informatika ke depannya.

KEPALA,

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19690829 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I. Pendahuluan	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	6
C. Permasalahan Utama	8
D. Sistematika Pelaporan.....	9
BAB II. Perencanaan Kinerja	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	19
A. Pengukuran Kinerja.....	20
B. Capaian Kinerja	21
C. Realisasi Anggaran	52
D. Inovasi Perangkat Daerah	54
BAB IV. Penutup.....	56
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Dharmasraya	3
Gambar 1.2.	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	4
Gambar 1.3.	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Berdasarkan Pangkat dan Golongan	4
Gambar 1.4	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Lulusan IT	5
Gambar 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja 2018, 2019 dan 2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Website dan melakukan Pembaruan Informasi	27
Gambar 3.2	Peningkatan Jumlah Website Tahun 2016 Sampai Tahun 2021	27
Gambar 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja 2018, 2019 dan 2021 dalam IKU Persentase Nagari yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi	30
Gambar 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019, dan 2021 dalam IKU Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di Nagari	33
Gambar 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Jaringan Terintegrasi	37
Gambar 3.6	Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah Yang Terintegrasi	48
Gambar 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	43
Gambar 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2021 dalam IKU Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	5
Tabel 1.2.	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Berdasarkan Urusan.....	5
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.....	13
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.....	15
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.....	16
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pemerintah Daerah dan Akses Masyarakat Terhadap Informasi Pembangunan Daerah.....	22
Tabel 3.2.	Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi Tahun 2021.....	23
Tabel 3.4	Website yang Dibuat Tahun 2016	25
Tabel 3.5	Website yang Dibuat Tahun 2017	25
Tabel 3.6	Website yang Dibuat Tahun 2018	25
Tabel 3.7	Website yang Dibuat Tahun 2019	26
Tabel 3.8	Website yang Dibuat Tahun 2021	27
Tabel 3.10	Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi.....	27
Tabel 3.11	Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Nagari yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi Tahun 2021 ...	29

Tabel 3.12	Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Persentase Nagari yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi	30
Tabel 3.13	Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Nagari Tahun 2021..	33
Tabel 3.14	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab. Dharmasraya.....	34
Tabel 3.15	Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Nagari.....	34
Tabel 3.16	Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Jaringan Terintegrasi	36
Tabel 3.17	Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2017	38
Tabel 3.18	Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2018.....	39
Tabel 3.19	Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2019	39
Tabel 3.20	Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2020	39
Tabel 3.21	Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2021	40
Tabel 3.22	Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Jaringan Terintegrasi.....	40
Tabel 3.23	Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2021	42
Tabel 3.24	Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dharmasraya Tahun 2016-2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah.....	44
Tabel 3.25	Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektorial Tahun 2021.....	48

Tabel 3.26	Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor.....	48
Tabel 3.27	Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	50
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2021 dalam IKU Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya...	50
Tabel 3.29	Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Hasil Penilaian AKIP Diskominfo oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya	51
Tabel 3.30	Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021
- Lampiran 2. SK Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021..... ..
- Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021
- Lampiran 4. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Program dan Kegiatan
- Lampiran 5. Monitoring Rencana Aksi Dinas Komunikasi dan Informatika 2021
- Lampiran 6. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021..... ..



**PEMERITAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Telp. 0754 (451578) Sikabau Kode Pos
(27573)



Website: dharmasrayakab.go.id e-mail : diskominfo.dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR: 189.1/ /KPTS-DISKOMINFO/2022**

**TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
2022**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, perlu disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Kabupaten Dharmasraya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

- KEDUA : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh Bagian di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- KETIGA : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2022

KEPALA,

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19690829 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.



**PEMERITAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Telp. 0754 (451578) Sikabau Kode Pos
(27573)

Website: dharmasrayakab.go.id e-mail :
diskominfo.dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR: 189.1/ /KPTS-DISKOMINFO/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan pembangunan, perlu disusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Penyusunnya dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021
2. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021
3. Mengusulkan konsep rencana kerja kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya untuk ditetapkan sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2022

KEPALA,

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19690829 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 189.1/ /KPTS-DISKOMINFO/2022
TANGGAL : 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2021**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
3.	Kasubag. Keuangan, Program dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Kabid. Komunikasi dan Informatika	Koordinator Tim Perumus
5.	Kabid. Persandian	Anggota Tim Perumus
6.	Kabid. Statistik	Anggota Tim Perumus
7.	Kasi. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinator Tim Pengumpulan Bahan
8.	Kasi. Penyelenggaraan E-government	Anggota Tim Pengumpulan Bahan
9.	Kasi. Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika	Anggota Tim Pengumpulan Bahan
10.	Kasi. Tata Kelola Persandian	Anggota Tim Pengumpulan Bahan
11.	Kasi. Operasional Pengamanan Persandian	Anggota Tim Pengumpulan Bahan
12.	Kasi. Pengawasan dan Evaluasi Persandian	Anggota Tim Pengumpulan Bahan
13.	Kasi. Pengelolaan Data Statistik	Anggota Tim Pengumpulan Bahan
14.	Kasi. Informasi Data Statistik	Anggota Tim Pengumpulan Bahan
15.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Koordinator Tim Penyusun
16.	Putri Maharani, S.IP	Sekretariat Tim Penyusun
17.	Roza Firdaus, S.Pd	Sekretariat Tim Penyusun
18.	Yufrizal, A.Md	Anggota Tim Penyusun
19.	Asnimar, S.Sos	Anggota Tim Penyusun
20.	Dalpison Hendrik, S.ST	Anggota Tim Penyusun
21.	Putra Darmawan, S.Kom	Anggota Tim Penyusun
22.	Gilang Fajar Prasasty Utama, S.IKom	Anggota Tim Penyusun
23.	Boffin Kharsananda, S.Kom.M.Eng	Anggota Tim Penyusun
24.	Asyrawi Mulia, S.Kom	Anggota Tim Penyusun
25.	Fergi Yandi, A.Md	Anggota Tim Penyusun
26.	Febra Maspianto	Anggota Tim Penyusun

KEPALA,

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19690829 199009 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan memperhatikan program prioritas daerah dan isu-isu strategis bidang komunikasi dan informatika terkini, serta mengacu pada Renstra 2016-2021, sasaran strategis tersebut ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 yang merupakan implementasi dari 5 (lima) program prioritas yaitu:

1. Program Penunjangg Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang dihasilkan di tahun 2021 dengan capaian 82,29% atau berhasil, dapat dijelaskan berdasarkan perjanjian kinerja ini ditetapkan ke dalam 3 (tiga) tujuan dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja sebagai berikut:

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Interpretasi
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
			Persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Nagari	100%	21%	21%	Tidak Berhasil
			Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
		Meningkatnya Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	55%	55%	Cukup Berhasil
3	Meningkatkan fungsi statistik sektoral dan data dalam pengambil kebijakan pemerintah daerah dan perencanaan	Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
4	Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya	BB	BB	100%	Sangat Berhasil
Rata-Rata Kelompok Tertimbang						576%	Berhasil
Rata-Rata Capaian Sasaran (nilai mean)							82,29%

Kinerja keuangan tahun anggaran 2021 dapat tergambar dari realisasi belanja langsung Dinas komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 4.281.676.353,- atau 96,40% dari pagu anggaran sebesar Rp 4.441.739.646,- sebagaimana ditampilkan sebagai berikut:

Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

NO	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar	4.441.739.646	4.281.676.353	96,40%
1.	Program : Penunjangnng Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/Kota	3.192.810.846	3.038.169.646	95,16%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.906.290.600	1.850.993.833	97,10%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.605.450	115.305.905	99,74%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.262.796	1.043.958.658	91,39%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.652.000	27.911.250	97,41%
2.	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	400.103.750	397.692.657	99,40%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	400.103.750	397.692.657	99,40%
3.	Program : Aplikasi Informatika	678.251.300	677.332.400	99,86%
	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	678.251.300	677.332.400	99,86%
4.	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	118.339.500	117.873.300	99,61%
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	118.339.500	117.873.300	99,61%
5.	Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	52.234.250	50.608.350	96,89%
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.234.250	50.608.350	96,89%

Di luar sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemda Kabupaten Dharmasraya serta kemudahan akses tekomunikasi oleh masyarakat melalui penambahan menara untuk menghilangkan titik blankspot.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika ke depan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

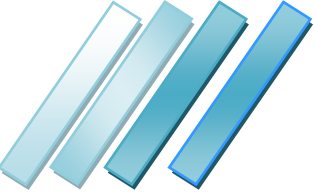
Dalam melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) unit Eselon III di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

Agar keseluruhan program dan kegiatan tersebut tercapai sesuai dengan target yang direncanakan, maka ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat Eselon IV.

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021, berdasarkan Peraturan Presiden



Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 ini disusun sebagai laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja selama Tahun 2019 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

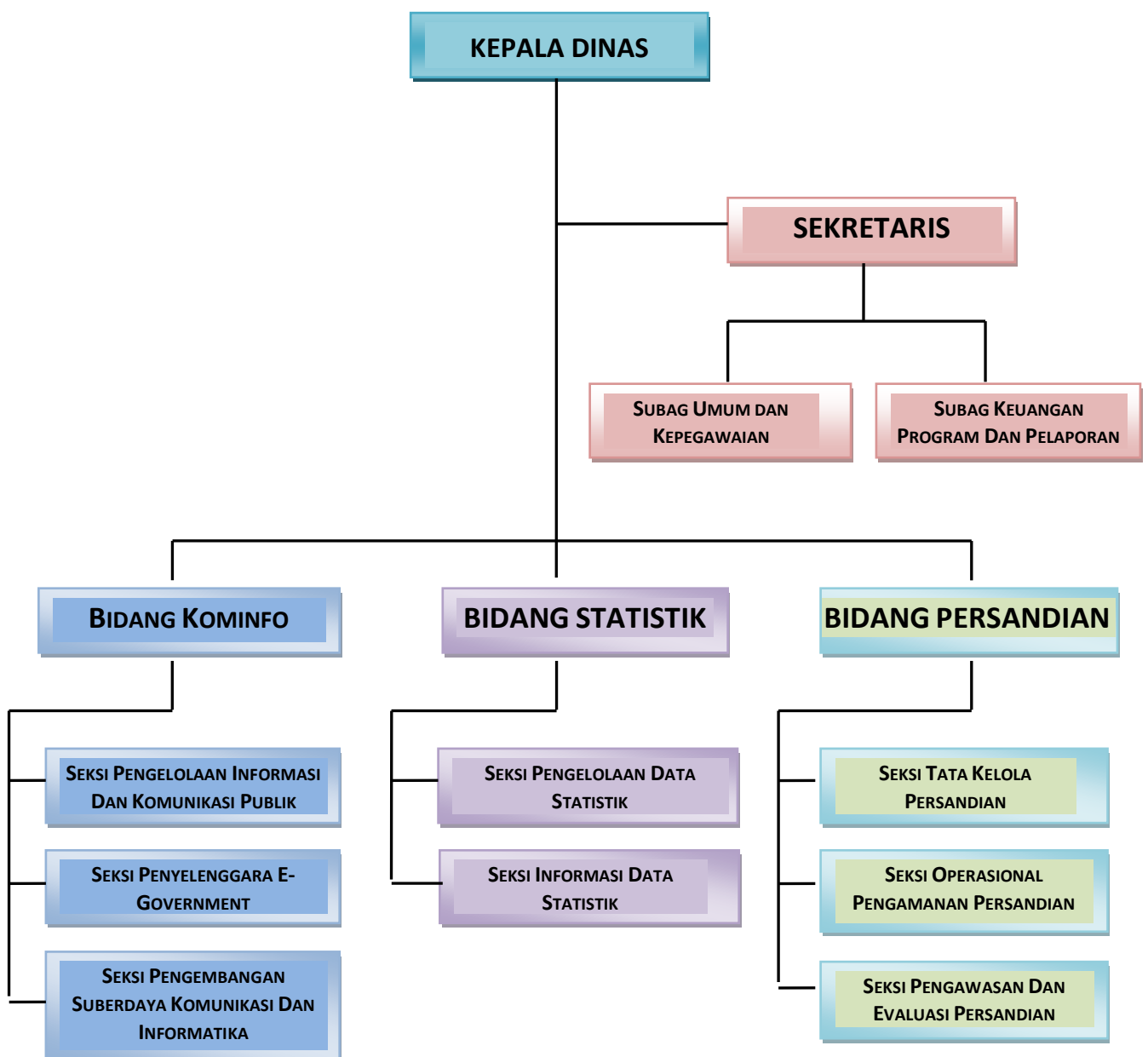
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan Program dan Pelaporan
- c. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika
 - Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - Seksi Penyelenggara E-Government
 - Seksi Pengembangan Suberdaya Komunikasi dan Informatika
- d. Kepala Bidang Statistik
 - Seksi Pengelolaan Data Statistik
 - Seksi Informasi Data Statistik
- e. Kepala Bidang Persandian
 - Seksi Tata Kelola Persandian
 - Seksi Operasional Pengamanan Persandian
 - Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian





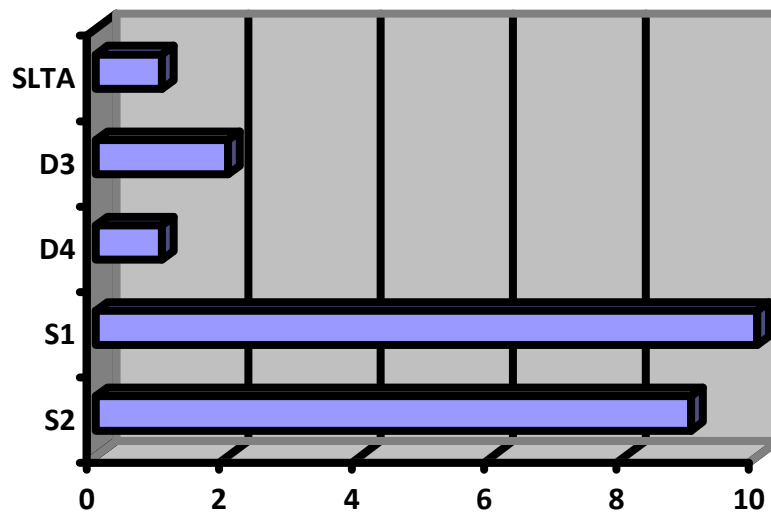
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Dharmasraya



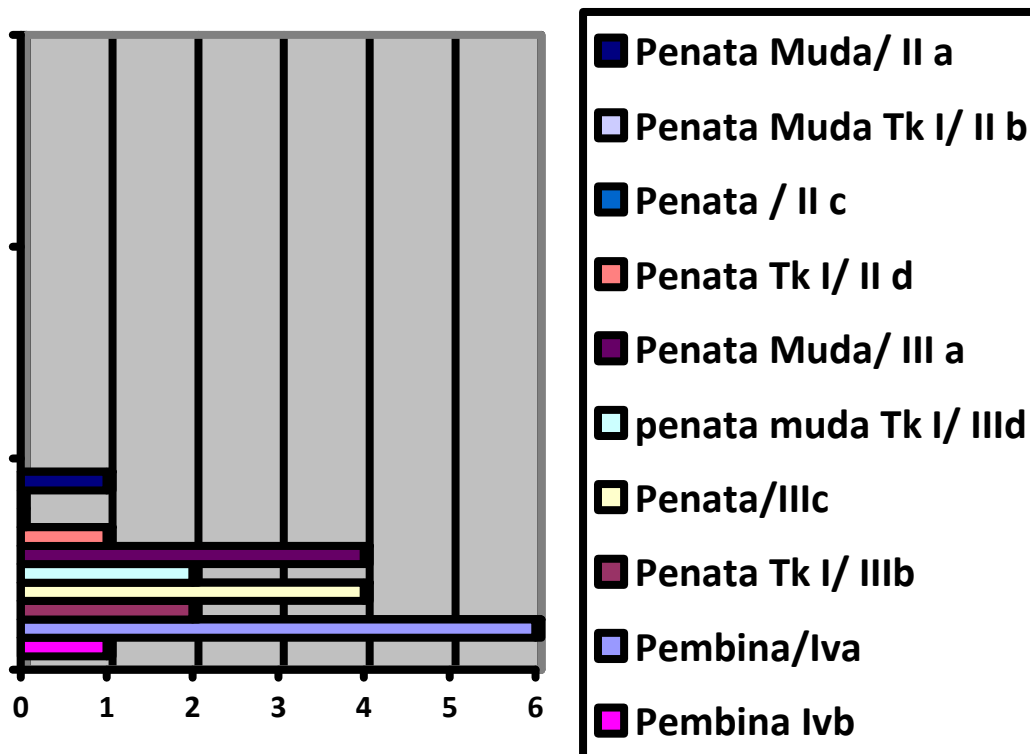
Pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 berjumlah 24 (dua puluh empat) orang ASN, dengan kualifikasi

pendidikan, pangkat dan Golongan, Jabatan serta pembagian sebaran per urusan disajikan dalam tabel berikut.



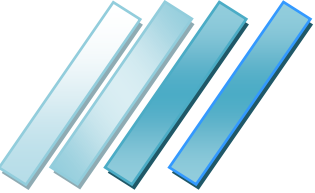
Gambar 1.2.

**Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**



Gambar 1.3.

**Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Berdasarkan
Pangkat dan Golongan**



Tabel 1.1.

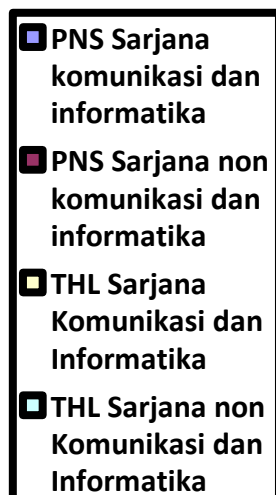
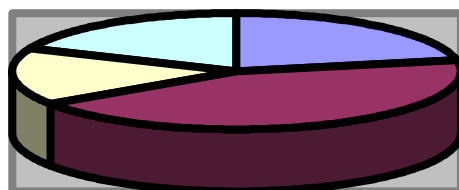
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Struktural	14 orang	
2.	Fungsional	9 orang	Termasuk difungsikan untuk bendahara pengeluaran, dan pembantu bendahara gaji
	Jumlah	21 orang	

Tabel 1.2.

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Berdasarkan Urusan

No	Urusan	Jumlah	Keterangan
1.	Komunikasi dan Informatika	16 orang	Termasuk Sekretariat
2.	Statistik	3 orang	
3.	Persandian	4 orang	
	Jumlah	21 orang	



Gambar 1.4

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Yang Lulusan IT



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika

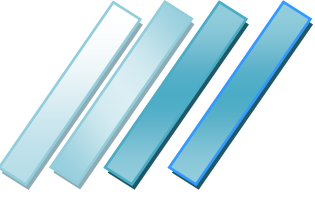
2. Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64), dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik; Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;



- Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
- Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- Merumuskan LPPD, LKPJ, LKj IP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang;
- Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada bupati;
- Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

UPT (Unit Pelayanan Terpadu) dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki UPT.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika belum terdapat ASN fungsional.

C. PERMASALAHAN UTAMA

Informasi dewasa ini merupakan kebutuhan utama. Hadirnya teknologi informasi sangat diidamkan oleh semua pihak. Namun demikian, seringkali informasi tersebut tidak terkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kebutuhan akan informasi mutlak dibutuhkan di era modernisasi. Optimalisasi pengelolaan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu penguasaan SDM akan pengelolaan informasi terbaru juga memberikan manfaat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
2. Komitmen dan keterlibatan pejabat pada top dan middle management di setiap OPD dalam workflow aplikasi yang masih belum optimal.
3. Minimnya penguasaan IT dikalangan PNS (tingkat literasi TIK yang minim).
4. Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap OPD yang belum kuat.
5. Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi.
6. Mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi.
7. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada bidang Persandian adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya regulasi pusat dan daerah tentang persandian
2. Belum terdapatnya standar keamanan informasi
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang bersifat khusus pengelolaan sandi

- 
4. Terbatasnya peralatan sandi yang berada di dalam negeri yang dapat diperoleh
 5. Keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang mampu mengelola persandian

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada bidang Statistik adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya integrasi data perencanaan pembangunan daerah
2. Sistem pengelolaan dan penyajian data dilakukan secara parsial
3. Ketidakteragamannya input data yang bersumber dari OPD dan instansi vertikal
4. Kelembagaan pengelolaan data belum mencerminkan kebutuhan dalam pembangunan
5. Belum adanya basis data yang handal, akurat, terintegrasi dan berkesinambungan untuk seluruh kebutuhan pembangunan
6. Kebutuhan akan tersedianya data dan informasi untuk indikator tertentu bergantung pada penyedia data
7. Data dan informasi pembangunan belum dianggap sebagai asset

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues/isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2016-



2021 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil revidi dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Tahun 2021.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu:

1. Sub Bab Pengukuran Kinerja, yang menguraikan tata cara pengukuran kinerja
2. Sub Bab Capaian Kinerja Per Sasaran Organisasi, yang menguraikan :
 - ♦ membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 - ♦ membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
 - ♦ membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
 - ♦ analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah diberikan
 - ♦ analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - ♦ analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
3. Realisasi Anggaran
4. Inovasi Perangkat Daerah

BAB 4 PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2021 dan Rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. KETERKAITAN DENGAN VISI DAN MISI BUPATI

Penyusunan RENSTRA 2016-2021 dilakukan dengan memperhatikan RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021 yang kemudian diselaraskan dengan upaya mengadaptasi masalah strategis terkait teknologi informasi yang berkembang saat ini. Dibutuhkan kebijakan yang diproyeksi dapat menghadapi berbagai masalah strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Dharmasraya, kendala geografis dan demografis yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan akses masyarakat terhadap informasi terhambat, hingga pada kendala peningkatan citra pemerintah daerah di mata masyarakat.

Selain itu, RENSTRA tersebut juga harus bisa menjawab tantangan dan potensi-potensi yang ada terkait tingginya penetrasi penggunaan internet di Dharmasraya yang mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam cara berkehidupan di masyarakat.

Arah pertumbuhan teknologi telekomunikasi dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat Dharmasraya yang tinggi di satu sisi menjadi tantangan yang harus dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika agar mampu menuangkan kebijakan yang tepat dan sesuai pada kondisi masyarakat yang sangat dinamis ke dalam RENSTRA. Namun, dalam pelaksanaannya, RENSTRA 2016-2021 yang telah ditetapkan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika merasa perlu untuk melakukan reviu/perubahan terhadap RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021. Hal ini dilandasi oleh beberapa alasan, antara lain Perubahan Nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika



yang sebelumnya hanya bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pariwisata dan Budaya.

Selain itu, dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam setahun terakhir membutuhkan intervensi pemerintah sebagai regulator untuk dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Dharmasraya di bidang komunikasi dan informatika.

1. V i s i

Visi sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, merupakan gambaran yang dirumuskan tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Bupati Kabupaten Dharmasraya, yakni; “mewujudkan Kabupaten Dharmasraya maju dan berbudaya”.

2. M i s i :

Adapun Misi dari Bupati Kabupaten Dharmasraya yang berhubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.

3. Tujuan

1. Meningkatkan keterbukaan informasi public
2. Meningkatkan fungsi statistik sektoral dan data dalam pengambil kebijakan pemerintah daerah dan perencanaan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah

4. Sasaran

- 1) Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah.
- 2) Meningkatnya pengamanan informasi.
- 3) Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas.
- 4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika



5. Indikator Sasaran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan indikator sasaran untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Adapun indikator sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya yang menjadi acuan untuk periode tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan
- 2) Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan
- 3) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat nagari
- 4) Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan telekomunikasi
- 5) Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.
- 6) Persentase ketersediaan data statistik sektoral
- 7) Hasil penilaian AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika oleh Inspektorat

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya

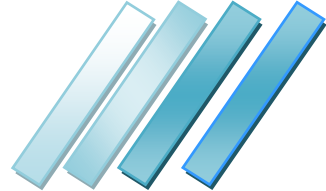
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Persentase perangkat daerah dan memiliki web site yang dapat diakses masyarakat	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan
			Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat nagari
			Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi
		Meningkatnya pengamanan informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah
Meningkatkan fungsi statistik sektoral dan data dalam pengambil kebijakan pemerintah daerah dan perencanaan	persentase ketersediaan data untuk pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan data statistik sektoral
Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah	Indeks reformasi birokrasi (indeks RB)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil penilaian AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika oleh Inspektorat

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.



Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%
		Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat nagari	100%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	100%
2.	Meningkatnya pengamanan informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	100%
3.	Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya	BB

No	Program	Anggaran perubahan
1.	Program : Penunjangg Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.192.810.846
2.	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 400.103.750
3.	Program : Aplikasi Informatika	Rp 678.251.300
4.	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 118.339.500
5.	Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 52.234.250



Tabel 2.3**Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sekretaris		
1.	Terlaksanananya mekanisme kerja dan sistem manajemen proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transformasi data dan layanan antar pemerintah	Tercapainya kelancaran kegiatan koordinasi dan adminitrasi perkantoran	1 th
		Terealisasinya jasa surat-menyurat	1.000 surat
		Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur	100%
		Tersusunnya Laporan Keuangan Semester dan Tahunan	2 dok
		Tersusunnya renja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai RPJMD	1 dok
	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan		
1.	Terlaksananya tertib keuangan, program dan pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersusunnya administrasi keuangan yang berbasis elektronik yang tertata dan handal	100%
		Tersusunnya perencanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan program daerah tepat waktu	100%
		Tersusunnya pelaksanaan pelaporan kegiatan dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika	100%
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
1.	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan	Tersusunnya laporan aset tepat waktu	100%
2.	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pengajuan SKP tepat waktu	100%
	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika		
1.	Mewujudkan transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%
		Persentase nagari yang dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%
		Persentase nagari yang memiliki kelompok informasi masyarakat	100%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan telekomunikasi	100%

SAKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	pengawasan dan evaluasi persandian	evaluasi persandian	
	Kepala Bidang Statistik		
1.	Terwujudnya ketersediaan data pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan jenis data perangkat daerah	100%
	Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik		
1.	Tersedianya dokumen data statistik Kabupaten Dharmasraya secara tepat waktu	Jumlah dokumen data statistik Kabupaten Dharmasraya secara tepat waktu	2 Dok
	Kepala Seksi Informasi Data Statistik		
1.	Tersedianya Data Dharmasraya untuk perencanaan pembangunan	Jumlah data yang dipakai untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	50%

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditunjukkan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun 2016-2021, RKPD Tahun 2021, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan Daerah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

1. > 85 : sangat berhasil
2. $70 < X \leq 85$: berhasil
3. $55 < X \leq 70$: cukup berhasil
4. < 55 : tidak berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:



Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

- Sangat Berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

Capaian Kinerja

Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 2 (dua) tujuan dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis. Tujuan, indikator tujuan dan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

➤ Sasaran Strategis :

Meningkatnya Transparansi Pemerintah Daerah dan Akses Masyarakat terhadap Informasi Pembangunan Daerah

Tabel 3.1

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi
Pemerintah Daerah dan Akses Masyarakat Terhadap Informasi
Pembangunan Daerah Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6
1	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Nagari	100%	21%	21%	Tidak Berhasil
	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Rata-Rata Kelompok Tertimbang				321%	Berhasil
Rata-Rata Capaian Sasaran (nilai mean)					80,25

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Website dan Melakukan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Website adalah kumpulan halaman suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu, saling berhubungan dan dapat diakses secara luas. Manfaat website yaitu menyediakan informasi yang bisa mudah diakses, dilihat, dan diketahui orang banyak. Pembaruan informasi merupakan pemberian informasi atau up date informasi. Website resmi milik Pemerintah Daerah berarti website resmi yang menyajikan informasi kegiatan dan dikelola perangkat daerah. Keberadaan website dibuktikan dengan alamat website.

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2021

Sasaran strategis pertama melalui indikator kinerja persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi, dalam tahun 2021 ditargetkan 100% untuk mendukung penyebaran informasi telah dilakukan pengaktifan web site. Dalam hal ini dibuat website untuk OPD dan beberapa website tambahan. Hasil



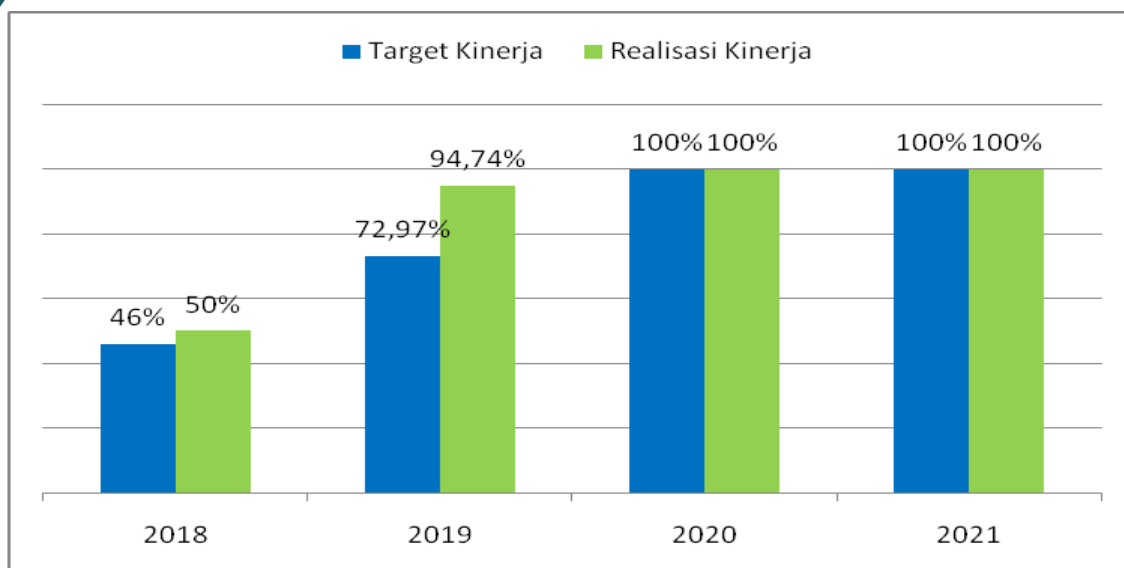
pelaksanaan kegiatan yaitu website induk dalam dharmasraya.go.id yang dikelola oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Humas sebanyak 1 unit dengan sub domain 52 unit terdiri dari website OPD dan PPID, JDIH, rumah data, sistem informasi keprotokolan dan sistem informasi persuratan elektronik. Dalam tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% dan telah tercapai seluruhnya di tahun 2020, dan tahun 2021 dikembangkan website untuk bagian di Sekretariat Daerah sebanyak 10 unit, namun ada 1 UPT yang belum memiliki website yaitu RSUD Sungai Rumbai yang merupakan pembentukan baru dan diresmikan tahun 2020, sehingga belum terhitung dalam target capaian 5 tahun yang akan ditargetkan untuk pembuatan website di tahun 2022.

Tabel 3.2

Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%
		- Jumlah OPD memiliki Website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 Kali sebulan	38 OPD	38 OPD	
		- Jumlah OPD di Kabupaten Dharmasraya	38 OPD	38 OPD	

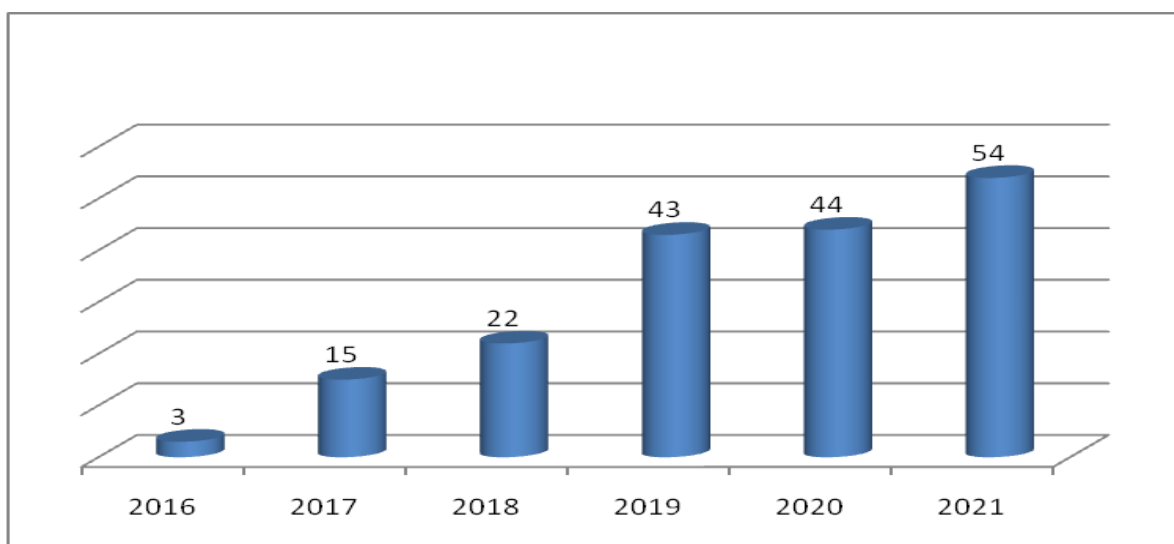
Tahun 2021 dibandingkan Tahun 2020 telah tercapai seluruhnya 100%. Tahun 2021 dikembangkan website untuk bagian di Sekretariat Daerah sebanyak 10 unit. Penambahan website tahun 2016 sampai 2021 seperti ditampilkan.



Gambar 3.1

Perbandingan Capaian Kinerja 2018 s.d 2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi

Jika dilihat dari peningkatan jumlah website setiap tahun, maka peningkatan pembuatan website OPD tertinggi di tahun 2019 dari tahun 2018, tahun 2020 hanya difokuskan kepada OPD yang belum memiliki website yaitu RSUD Sungai Dareh dan tahun 2021 difokuskan pada pengembangan website Sekretariat Daerah.



Gambar 3.2

Peningkatan Jumlah Website Tahun 2016 Sampai Tahun 2021

Alamat dan data domain dan subdomain website yang dibuat setiap tahun seperti ditampilkan dibawah ini.

Tabel 3.4
Website yang Dibuat Tahun 2016

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	Website Resmi Pemkab Dharmasraya	http://dharmasrayakab.go.id
2.	Website Bagian Hukum Setda	http://jdih.dharmasrayakab.go.id
3.	PPID	http://ppid.dharmasrayakab.go.id

Tabel 3.5
Website yang Dibuat Tahun 2017

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	http://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id
2.	Website Dinas Kesehatan	http://dinkes.dharmasrayakab.go.id
3.	Website Dinas Pendidikan	http://disdik.dharmasrayakab.go.id
4.	Website Bappeda	http://bappeda.dharmasrayakab.go.id
5.	Website Diskominfo	http://diskominfo.dharmasrayakab.go.id
6.	Website DPMPTSP	http://pmptsp.dharmasrayakab.go.id
7.	Website Dinas Kumperdag	http://diskumperdag.dharmasrayakab.go.id
8.	Website Dinas Budparpora	http://disbudparpora.dharmasrayakab.go.id
9.	Website Dinas Pertanian	http://dinas pertanian.dharmasrayakab.go.id
10.	Website Dinas Pangan dan Perikanan	http://dpp.dharmasrayakab.go.id
11.	Website Dinas LH	http://dlh.dharmasrayakab.go.id
12.	Website Dinas PU	http://dispupr.dharmasrayakab.go.id

Tabel 3.6
Website yang Dibuat Tahun 2018

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	Website inspektorat	http://inspektorat.dharmasrayakab.go.id
2.	Website BKD	http://bkd.dharmasrayakab.go.id
3.	Website BKPSDM	http://bkpsdm.dharmasrayakab.go.id
4.	Website Dinas PMD	http://pmd.dharmasrayakab.go.id
5.	Website Dinas SOSP3APPKB	http://dinsos.dharmasrayakab.go.id
6.	Website Dinas Nakertrans	http://distransnaker.dharmasrayakab.go.id
7.	Website Dinas Perkimtan	http://perkimtan.dharmasrayakab.go.id

Tabel 3.7
Website yang Dibuat Tahun 2019

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	Dinas Perhubungan	http://dishub.dharmasrayakab.go.id
2.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	http://dpkd.dharmasrayakab.go.id
3.	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	http://kesbangpol.dharmasrayakab.go.id
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	http://bpbd.dharmasrayakab.go.id
5.	Sekretariat DPRD	http://setwan.dharmasrayakab.go.id
6.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	http://satpolpp.dharmasrayakab.go.id
7.	Kecamatan Pulau Punjung	http://kec-pulaupunjung.dharmasrayakab.go.id
8.	Kecamatan IX Koto	http://kec-sembilankoto.dharmasrayakab.go.id
9.	Kecamatan Sitiung	http://kec-sitiung.dharmasrayakab.go.id
10.	Kecamatan Tiumang	http://kec-tiumang.dharmasrayakab.go.id
11.	Kecamatan Timpeh	http://kec-timpeh.dharmasrayakab.go.id
12.	Kecamatan Padang Laweh	http://kec-padanglaweh.dharmasrayakab.go.id
13.	Kecamatan Koto Baru	http://kec-kotobarau.dharmasrayakab.go.id
14.	Kecamatan Koto Salak	http://kec-kotosalak.dharmasrayakab.go.id
15.	Kecamatan Sungai Rumbai	http://kec-sungairumbai.dharmasrayakab.go.id
16.	Kecamatan Koto Besar	http://kec-kotobesar.dharmasrayakab.go.id
17.	Kecamatan Asam Jujuhan	http://kec-asamjujuhan.dharmasrayakab.go.id
18.	Rumah Data (Statistik Nagari)	http://rumahdata.dharmasrayakab.go.id
19.	Sistem Informasi Keprotokolan	http://sikadar.dharmasrayakab.go.id
20.	Sistem Informasi Persuratan Elektronik	http://simpler.dharmasrayakab.go.id
21.	Sistem Pustaka On-Line	http://inlis.dharmasrayakab.go.id

Tabel 3.8
Website yang Dibuat Tahun 2020

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	RSUD Sungai Dareh	http://rsud.dharmasrayakab.go.id

Tabel 3.9
Website yang Dibuat Tahun 2021

No	Nama OPD	Alamat Website
1.	Bagian Umum dan Perlengkapan	http://umum.setda.dharmasrayakab.go.id
2.	Bagian Hukum	http://hukum.setda.dharmasrayakab.go.id
3.	Bagian Organisasi	http://organisasi.setda.dharmasrayakab.go.id
4.	Bagian Humas	http://humas.setda.dharmasrayakab.go.id
5.	Bagian Protokol	http://protokoler.setda.dharmasrayakab.go.id
6.	Bagian Tapem	http://pemerintahan.setda.dharmasrayakab.go.id
7.	Bagian Perekonomian	http://perekonomian.setda.dharmasrayakab.go.id
8.	Bagian Kesra	http://kesra.setda.dharmasrayakab.go.id
9.	Bagian Pembangunan	http://pembangunan.setda.dharmasrayakab.go.id
10.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	http://pbj.setda.dharmasrayakab.go.id

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan RENSTRA

Kondisi pencapaian sampai tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dharmasraya Tahun 2016-2021 sebesar 100%. Peningkatan kinerja terjadi dengan peningkatan jumlah website yang dikelola pemerintah daerah yang digunakan untuk pelayanan.

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Tahun 2020	RENSTRA 2016-2021	Deviasi
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	0%



c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian strategi peningkatan perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi menggunakan domain dharmasrayakab.go.id. Proses pembuatan website tahun 2016 sampai tahun 2018 digunakan pihak ketiga. Pada tahun 2018 telah dilakukan rekrutmen tenaga ahli programmer yang mulai aktif tahun 2019 dan salah satu target kerja tenaga ahli programmer untuk mampu membuat website dan tahun 2021 lebih dimanfaatkan untuk pengembangan dan penyempurnaan website yang sudah ada.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program yang menunjang keberhasilan strategi ini yaitu program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi melalui rekrutmen tenaga ahli programmer pada tahun 2018.

Permasalahan yang ditemui untuk mencapai target peningkatan perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi tahun 2021 adalah kemampuan operator perangkat daerah pengisi pembaruan informasi yang terbatas.

Apapun upaya penyelesaian yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target strategi peningkatan perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi adalah: langsung dilakukan konsultasi dalam proses pengisian melalui staf Pengelola Teknologi Informasi dan membuat jaringan komunikasi group melalui media sosial whatsapp untuk berbagai bentuk konsultasi dan koordinasi dalam melakukan pengisian dan perbaikan berita/informasi yang akan diposting.

2. Persentase Nagari Yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Website adalah kumpulan halaman suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu, saling berhubungan dan dapat diakses secara luas. Manfaat website yaitu menyediakan informasi yang bisa mudah diakses, dilihat, dan diketahui

orang banyak. Pembaruan informasi merupakan pemberian informasi atau up date informasi. Website resmi Nagari berarti website resmi yang menyajikan informasi kegiatan dan dikelola Nagari. Keberadaan website dibuktikan dengan alamat website.

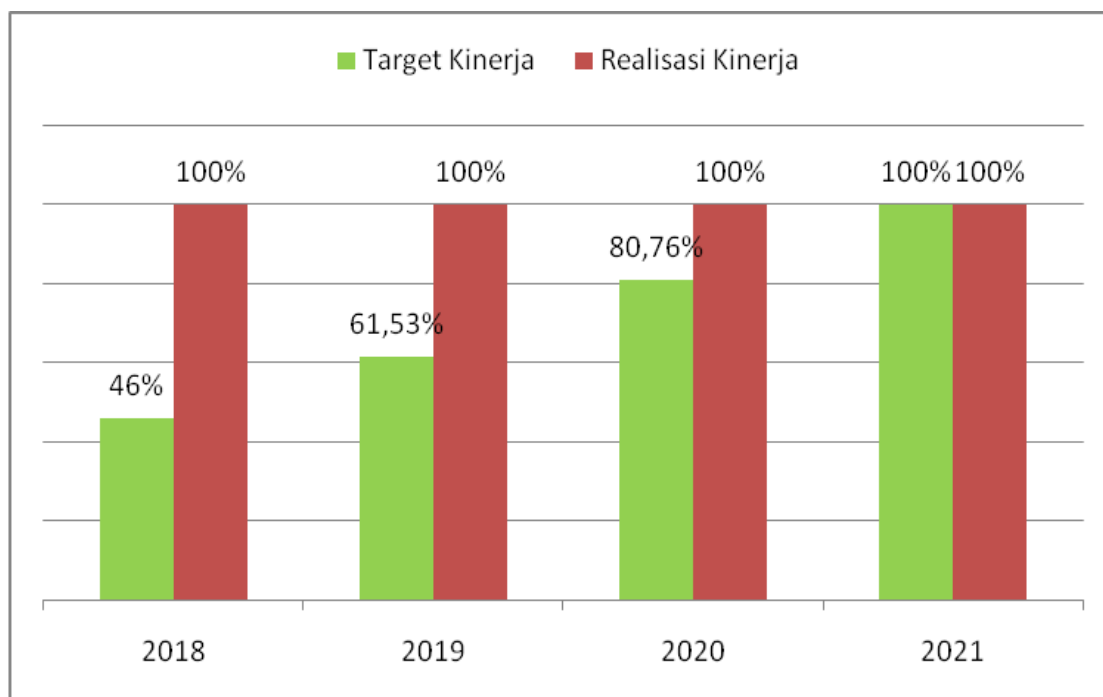
a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2021

Sasaran strategis pertama melalui indikator kinerja persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi, dalam tahun 2020 ditargetkan 100% untuk mendukung penyebaran informasi telah dilakukan pengaktifan web site. Dalam tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi 100%.

Tabel 3.11
Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Nagari yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	3	3	4	5	6
1	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%
		- Jumlah Nagari memiliki Website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 Kali sebulan	52 Nagari	52 Nagari	
		- Jumlah Nagari di Kabupaten Dharmasraya	52 Nagari	52 Nagari	

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 dengan tahun 2020 sama telah tercapai 100% dan tidak ada lagi penambahan dan pengurangan kuantitas, namun terjadi penurunan kualitas, dimana terjadi kurang aktifan dalam pengisian berita selama pandemic, karena keterbatasan komunikasi karena adanya pandemic COVID 19.



Gambar 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja 2018 s.d 2021 dalam IKU Persentase Nagari yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan RENSTRA

Kondisi pencapaian sampai tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dharmasraya Tahun 2016-2021 sebesar 100% atau sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 3.12

Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Persentase Nagari yang Memiliki Website dan Melakukan Pembaruan Informasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Tahun 2021	RENSTRA 2016-2021	Deviasi
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	0%



c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian strategi pembentukan website Nagari dengan memanfaatkan SDM Nagari berupa dana dan tenaga dengan dikoordinasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga langsung dapat tercapai 100% dalam tahun 2021. Pemanfaatan tenaga monitoring tahun 2021 dilaksanakan bersama antara PNS dan Non PNS melalui fasilitasi whatsapp.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Dalam kegiatan ini tidak dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan, namun pencapaian ini dilaksanakan pada dasarnya adalah melakukan penyebaran informasi pembangunan di masyarakat melalui up date informasi pemerintah daerah dengan pembentukan website di masing-masing nagari yang telah dilakukan dengan bekerjasama SINAR yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan dilaksanakan oleh pihak ke-tiga. Pendanaan kegiatan ini dilakukan oleh Nagari. Pembinaan dan monitoring dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilaksanakan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau secara terpisah dan dibiayai oleh OPD masing-masing. Pembiayaan di Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dalam program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Permasalahan yang ditemui untuk mencapai target peningkatan nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi adalah Website nagari berupa Sistem Informasi Nagari (SINAR) yang dimiliki oleh masing-masing Nagari diblokir oleh pihak ke-3 yang merupakan pembuat.

Apapun upaya penyelesaian yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target peningkatan nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi adalah: koordinasi dengan nagari secara terbatas dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan fasilitator dalam pembuatan SINAR dan pembina Nagari.



3. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Nagari

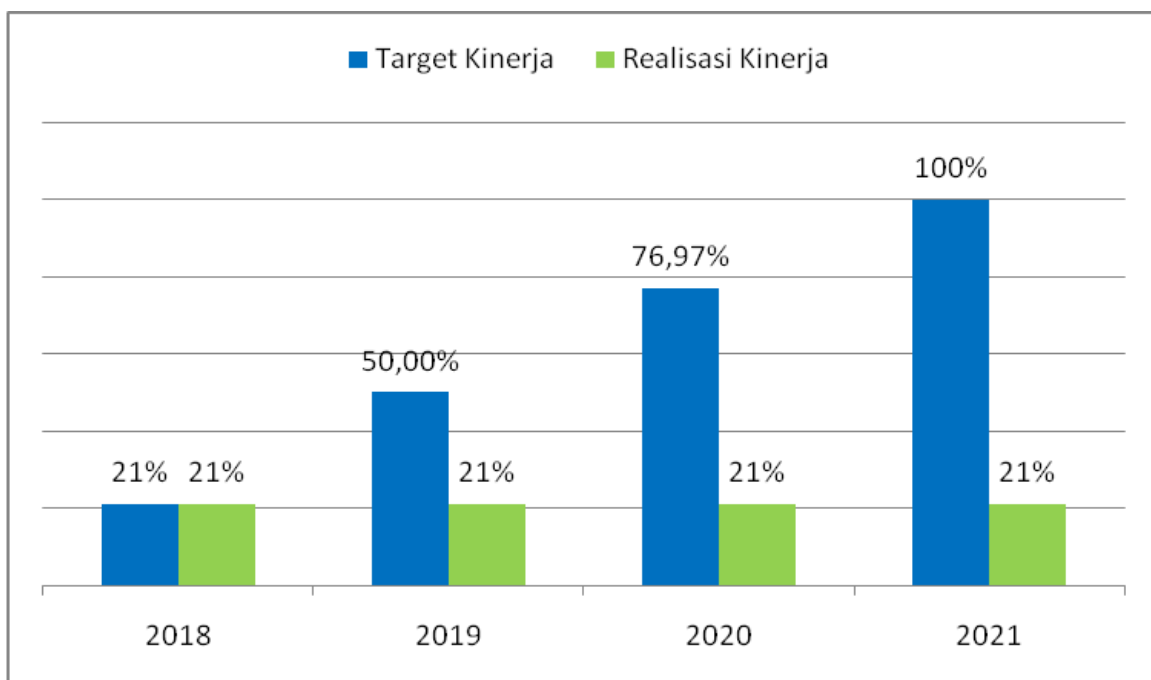
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai layanan informasi masyarakat terhadap isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. KIM dibentuk untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembentukan KIM berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pembentukan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat Nagari dibuktikan dengan SK Wali Nagari.

b. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2021

Sasaran strategis pertama melalui indikator kinerja cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat Nagari. Peningkatan peran KIM ini dilaksanakan untuk meningkatkan informasi pembangunan dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Apabila dilihat perbandingan antara target dan hasil capaian dalam tahun 2021 ditargetkan 100% atau tercapai kegiatan 52 kelompok, namun hanya terealisasi 21% atau 11 kelompok. Kelompok ini baru dibentuk dalam 1 kecamatan 1 nagari belum mencakup seluruh nagari.

Tabel 3.13
Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Cakupan Pengembangan Dan PEMBERDAYAAN Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Nagari Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Nagari	100%	21%	21%
		- Jumlah pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	52 klp	11 klp	
		- Jumlah Nagari di Kabupaten Dharmasraya	52 Nagari/ 52 Klp	52 Nagari/ 52 klp	



Gambar 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2021 dalam IKU Cakupan Pengembangan dan PEMBERDAYAAN Kelompok Informasi Masyarakat di Nagari

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 dengan tahun 2020 sama-sama tercapai 11 kelompok. Tahun 2021 tidak dilakukan tahapan pembinaan karena keterbatasan anggaran.

Tabel 3.14
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kab. Dharmasraya

No	Nagari	Kecamatan	Tahun Pembentukan
1.	Sungai Duo	Sitiung	2016
2.	Koto Ranah	Koto Besar	2016
3.	Taratak Tinggi	Timpeh	2017
4.	Simalidu	Koto Salak	2017
5.	Kurnia Selatan	Sungai Rumbai	2017
6.	Sungai Langkok	Tiumang	2017
7.	Koto Baru	Koto Baru	2018
8.	Muaro Sopan	Padang Laweh	2018
9.	Pulau Punjung	Pulau Punjung	2018
10.	Alahan Nan Tigo	Asam Jujuhan	2018
11.	Silago	Sembilan Koto	2018

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan RENSTRA

Kondisi pencapaian sampai tahun 2021 sebesar 21% jika dibandingkan dengan target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dharmasraya Tahun 2016-2021 sebesar 100% dan terjadi penurunan dari target.

Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Nagari

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Tahun 2021	RENSTRA 2016-2021	Deviasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Nagari	21%	100%	-79%



c. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target pencakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Nagari belum sesuai dengan target dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemanfaatan SDM di Kasi yang konsen untuk pencapaian target ini. Kebutuhan sarana dan prasarana kendaraan ke nagari menggunakan kendaraan operasional, namun belum didukung dengan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan di tingkat Nagari dan Kecamatan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program yang menunjang keberhasilan indikator strategi ini yaitu program peningkatan fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi dengan kegiatan pembinaan dan peningkatan peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Permasalahan yang ditemui untuk mencapai target pencakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Nagari adalah peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kurang aktif dalam memberikan informasi di masyarakat melalui berbagai jenis media yang dimiliki.

Apapun upaya penyelesaian yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target pencakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Nagari adalah: membawa ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di Kabupaten Dharmasraya dari setiap Kecamatan untuk melakukan studi banding ke Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berprestasi agar lebih memahami dan mampu menularkan ilmunya ke anggota dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) lainnya.

4. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Jaringan Terintegrasi

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Jaringan terintegrasi pelayanan digital adalah sistem telekomunikasi dimana layanan data,



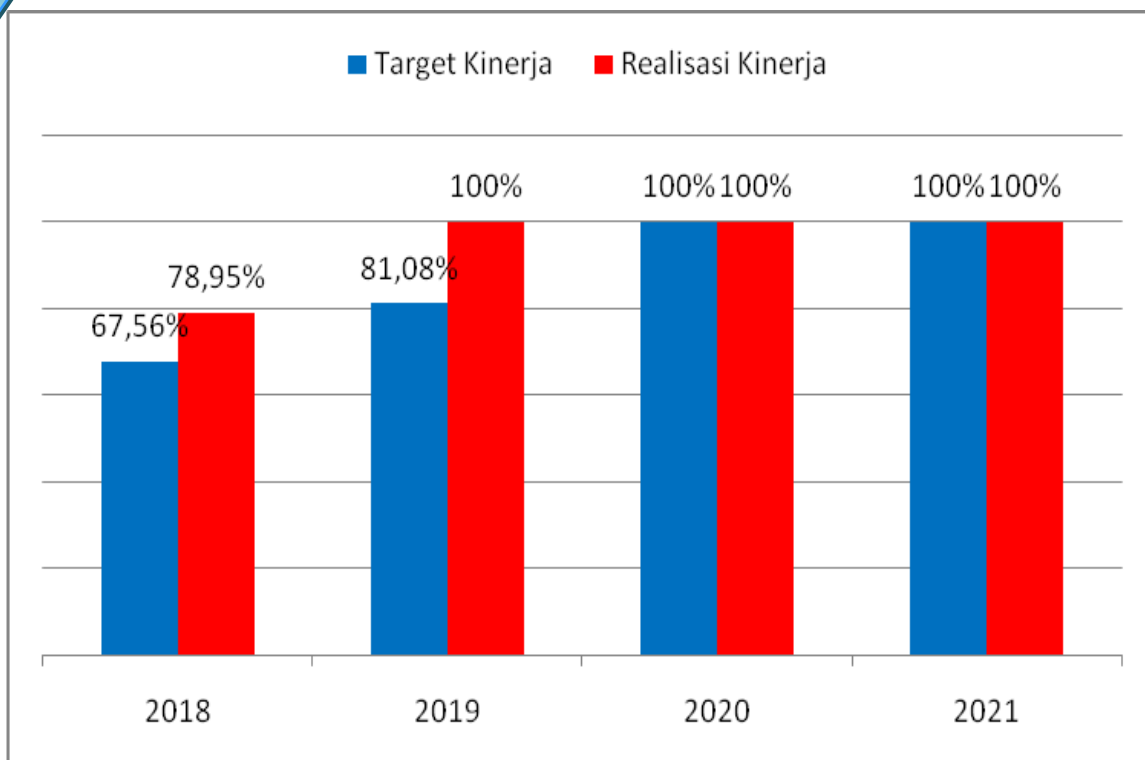
suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan menyediakan konektivitas digital untuk menunjang ruang lingkup pelayanan yang luas. Keuntungan penggunaan jaringan telekomunikasi terintegrasi yaitu: kecepatan pelayanan, efisien karena dapat mengirim berbagai jenis layanan, efisien dalam pemanfaatan waktu, dan hemat biaya. Pembangunan jaringan terintegrasi memudahkan perangkat daerah dalam melayani dari unitnya masing-masing.

b. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2021

Apabila dilihat perbandingan antara target dan hasil capaian dalam tahun 2021 telah sesuai target 100% tercapai 100%. Hal ini terjadi karena tuntutan kemajuan teknologi informasi dalam pelayanan pemerintah yang bermuara dalam pelayanan publik. Pengintegrasian pertama yang dirasa sangat cepat dibutuhkan yaitu aplikasi SIPKD dan SIMDA serta CMS guna menekan terjadinya korupsi, sehingga diperlukan percepatan pengintegrasian, namun proses pengintegrasian yang dilaksanakan dengan sistem radio menggunakan astinet. Usaha yang dilakukan lainnya berupa peningkatan kualitas, dimana pemeliharaan terhadap kerusakan jaringan yang lebih diutamakan.

Tabel 3.16
Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Jaringan Terintegrasi

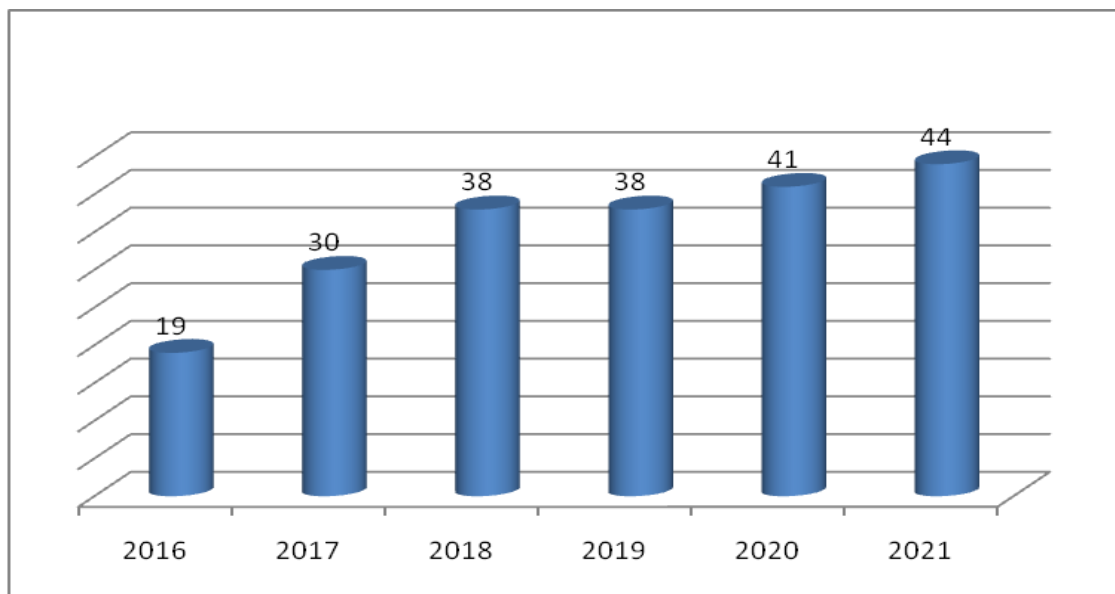
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	100%	100%	100%
		- Jumlah perangkat daerah yang memiliki jaringan telekomunikasi	38 OPD	38 OPD	
		- Jumlah perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya	38 OPD	38 OPD	



Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Jaringan Terintegrasi

Pembangunan jaringan terintegrasi dimulai dari tahun 2017 dan terus ditingkatkan. Di masa mendatang kualitas jaringan akan terus ditingkatkan baik dari segi penataan, kekuatan signal maupun jenis jaringan yang digunakan. Tahun 2020 dan Tahun 2021, peningkatan jaringan terus diupayakan meskipun dana APBD terbatas, namun menggunakan sumber APB Nagari dan dana BOS untuk proses pembangunan jaringan dan bandwidth disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Peningkatan jumlah perangkat daerah yang terintegrasi dapat ditampilkan sebagai berikut.



Gambar 3.6
Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah Yang Terintegrasi

Data pembangunan jaringan setiap tahun ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 3.17
Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2017

No	Nama OPD	Sumber Dana
1.	Sekretariat DPRD	APBD
2.	Sekretariat Daerah	APBD
3.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	APBD
4.	Dinas Pekerjaan Umum	APBD
5.	Dinas Kesehatan	APBD
6.	Dinas Pertanian	APBD
7.	Dinas Pendidikan	APBD
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	APBD
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	APBD
10.	Dinas Pangan dan Perikanan	APBD
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBD
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	APBD
13.	Dinas Lingkungan Hidup	APBD
14.	Badan Keuangan Daerah	APBD
15.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	APBD
16.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	APBD
17.	Inspektorat Daerah	APBD
18.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	APBD
19.	Rumah Sakit Umum Daerah	APBD

Tabel 3.18
Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2018

No	Nama OPD	Sumber Dana
1.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	APBD
2.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	APBD
3.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	APBD
4.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	APBD
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	APBD
6.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	APBD
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	APBD
8.	Dinas Perhubungan	APBD
9.	Kecamatan Pulau Punjung	APBD
10.	Kecamatan Sitiung	APBD
11.	Kecamatan Koto Baru	APBD

Tabel 3.19
Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2019

No	Nama OPD	Sumber Dana
1.	Kecamatan Sungai Rumbai	APBD
2.	Kecamatan Koto Besar	APBD
3.	Kecamatan Padang Laweh	APBD
4.	Kecamatan Koto Salak	APBD
5.	Kecamatan Timpeh	APBD
6.	Kecamatan Tiumang	APBD
7.	Kecamatan Sembilan Koto	APBD
8.	Kecamatan Asam Jujuhan	APBD

Tabel 3.20
Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2020

No	Nama	Sumber Dana
1.	Nagari Sungai Duo	APB Nagari
2.	Puskesmas Sitiung 1	BOP
3.	Puskesmas Padang Laweh	BOP

**Tabel 3.21****Pembangunan Jaringan OPD Terintegrasi Tahun 2021**

No	Nama OPD	Sumber Dana
1.	Nagari Sopan Jaya	APB Nagari
2.	Nagari Koto Besar	APB Nagari
3.	SMK N 1 Koto Baru	BOS

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan RENSTRA

Kondisi pencapaian sampai tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dharmasraya Tahun 2016-2021 sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2020 dengan tahun 2021 tidak terjadi penambahan jaringan karena sudah tercapai 100% di tahun 2020. Tahun 2021 hanya dilakukan pemeliharaan jaringan karena keterbatasan dana. Hasil ini sudah sesuai target.

Tabel 3.22**Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Jaringan Terintegrasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Tahun 2021	RENSTRA 2016-2021	Deviasi
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	100%	100%	0%

a. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Peningkatan jaringan OPD yang terintegrasi menggunakan tenaga pihak ke-3 untuk proses pembangunan dan pengaktifan jaringan dengan menggunakan astinet dari PT. Telkom. Monitoring pemasangan dan



kerusakan dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Informatika menggunakan tenaga PNS dan Non PNS.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program yang menunjang keberhasilan indikator strategi ini yaitu program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, kegiatan pembangunan jaringan antar OPD dan kegiatan pemeliharaan jaringan antar OPD serta pelaksanaan program kerjasama informasi dengan mass media melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana prasarana komunikasi.

Permasalahan yang ditemui untuk mencapai target perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi adalah kondisi topografi wilayah kecamatan yang belum terintegrasi seperti lokasi yang jauh dan terdapat lokasi perbukitan. Selain itu, proses legalisasi untuk melakukan relay ke lokasi kecamatan agak sulit karena harus menemui pemilik relay ke kantor pusat.

Adapun upaya penyelesaian yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi adalah: pencapaian sinyal ke kecamatan menunggakan relay milik PT. Telkom di Puncak Gunung Medan dan menggunakan relay menara BTS milik swasta. Proses relay memerlukan izin untuk penempatan melalui surat permintaan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan adanya surat persetujuan dari pemilik menara BTS.

➤ **Sasaran Strategis :**
Meningkatnya pengamanan informasi

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Persandian berperan mengamankan informasi yang bersifat rahasia dengan teknik enkripsi. Fungsi persandian ini dilaksanakan agar website dan atau aplikasi pelayanan tidak diretas atau dirusak oleh orang lain, sehingga mengganggu proses pelayanan.



a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2021

Dalam pencapaian sasaran strategis kedua ini yaitu meningkatnya pengamanan informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan beberapa kegiatan dengan hasil tabel di bawah ini.

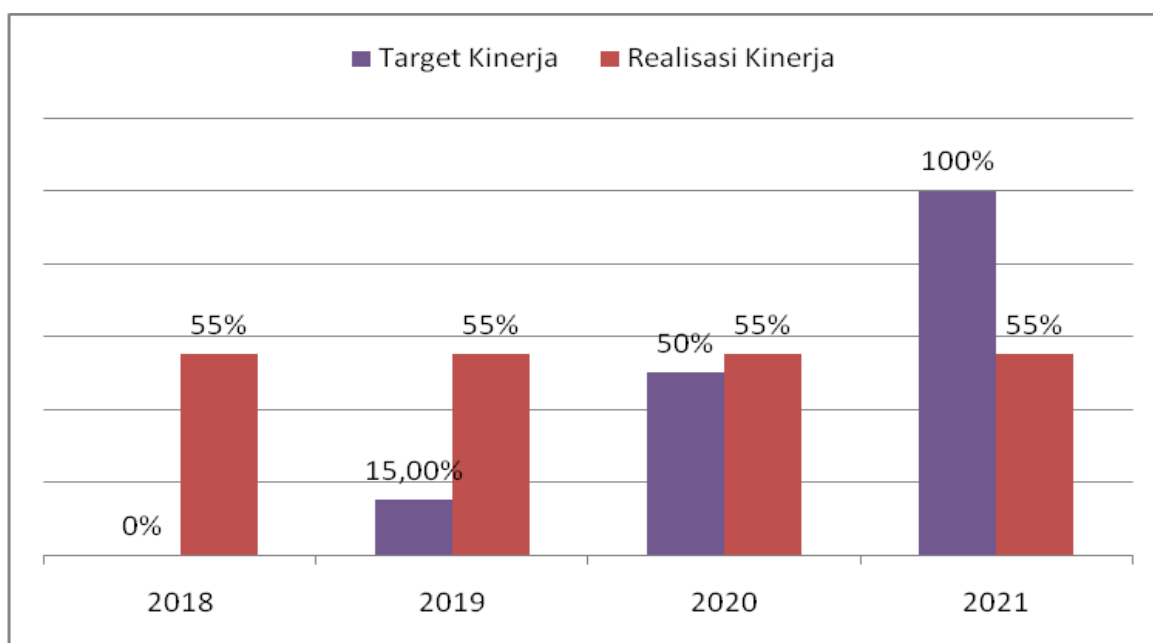
Sasaran strategis peningkatan pengamanan informasi ditargetkan 100% dalam tahun 2021. Tahun 2018 telah regulasi hukum berupa Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan tahun 2019 diterbitkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah diinformasikan ke seluruh OPD. Penilaian capaian kinerja dapat diinterpretasi penilaian **CUKUP BERHASIL**.

Tabel 3.23

Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	55%	55%
			- Jumlah website yang diberikan pengamanan sandi	138 Unit	21 Unit	
			- Jumlah perangkat daerah di Kabupaten Dharmasraya	38 OPD	38 OPD	
	Rata-Rata Kelompok Tertimbang					Cukup Berhasil
	Rata-Rata Capaian Sasaran (nilai mean)					55

Pencapaian tahun 2021 sebesar 55% sama dengan tahun 2020. Bidang persandian merupakan bidang baru yang dibebankan kepada daerah dan terus dilakukan berbagai upaya persiapan terutama regulasi hukum dalam pelaksanaan. Kegiatan dilakukan untuk pengamanan website sebanyak 21 website induk dan website subdomain. Selain itu, dilakukan pengamanan aplikasi yang dibangun oleh OPD dan berada di pusat server Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 4 (empat) jenis yaitu aplikasi SIPKD, Simda Keuangan, SKP Online, dan E-Disiplin.



Tabel 3.7

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan RENSTRA

Kondisi pencapaian sampai tahun 2021 sebesar 55% jika dibandingkan dengan target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dharmasraya Tahun 2016-2021 sebesar 100%. Pengamanan informasi dalam bidang persandian merupakan kewenangan baru yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yang sebelumnya seluruh pengamanan informasi menjadi kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN). Kebijakan ini



muncul sesuai perkembangan informasi terutama informasi elektronik yang digunakan melalui berbagai aplikasi yang rentan diretas oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Tabel 3.24

Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dharmasraya Tahun 2016-2021 dalam IKU Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Tahun 2021	RENSTRA 2016-2021	Deviasi
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	55%	100%	-45%

c. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian target pengamanan informasi diutamakan untuk pengamanan website dan berbagai aplikasi yang digunakan pemerintah daerah, maka dilaksanakan kerjasama dengan BSSN. Hal ini dilaksanakan karena belum adanya tenaga PNS yang memahami dan mampu melakukan pengamanan tersebut dengan kode persandian. Hal dasar yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pembentukan dasar hukum berupa Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pengamanan Informasi di Daerah dan akan dikembangkan dengan peraturan tentang pemanfaatan sertifikat digital.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program yang menunjang keberhasilan indikator strategi ini yaitu program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi daerah melalui kegiatan penyediaan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi, kegiatan pengelolaan peralatan sandi dan jaringan komunikasi sandi yang digunakan pemerintah daerah dan kegiatan fasilitasi peningkatan SDM dalam rangka penyelenggaraan



persandian untuk pengamanan informasi serta program persandian daerah dengan kegiatan IT Security Asessment pada Aplikasi yang digunakan Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang ditemui untuk mencapai target sasaran strategis meningkatnya pengamanan informasi adalah belum adanya sumberdaya manusia yang mampu melakukan assessment di Kabupaten Dharmasraya untuk mengamankan berbagai aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Adapun upaya penyelesaian yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target dalam strategi meningkatnya pengamanan informasi adalah: pelaksanaan kerjasama dengan BSSN untuk melakukan assessment terhadap berbagai aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.

➤ **Sasaran Strategis :**

Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Manfaat statistik sektoral adalah untuk mengetahui kecenderungan (trend), menentukan prioritas, acuan dalam evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk memperkirakan antisipasi terhadap resiko dan hambatan. Data dan Informasi

Statistik Sektoral menjadi acuan bagi penelitian, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan.

Tabel 3.25
Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2021

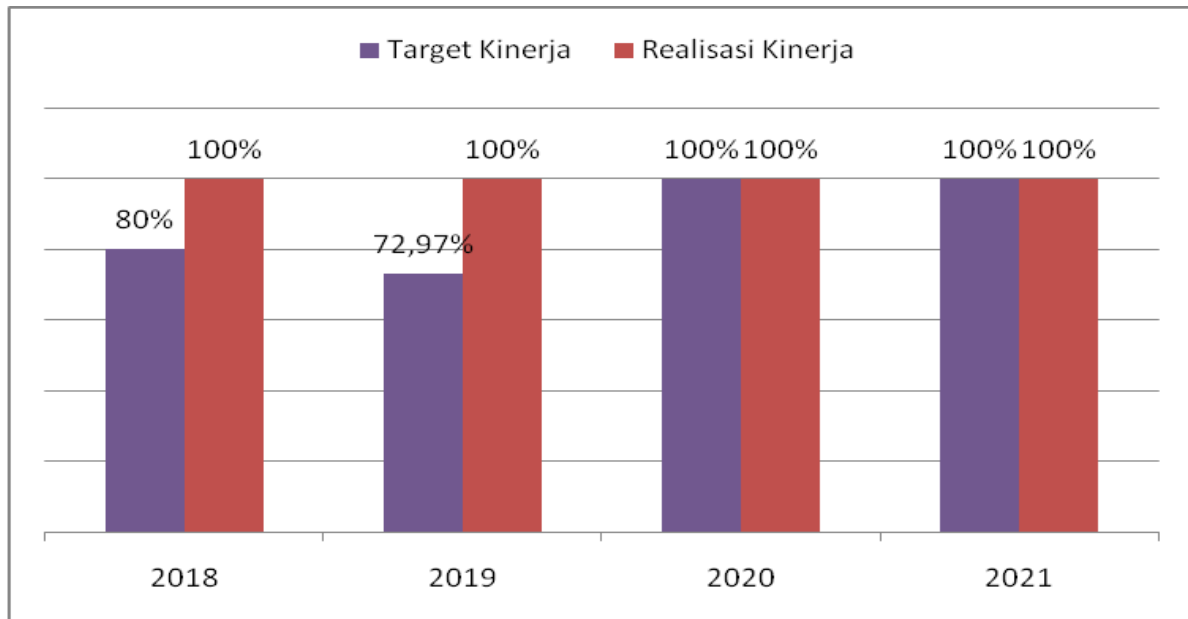
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan fungsi statistik sektoral dan data dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dan perencanaan	Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Rata-Rata Kelompok Tertimbang						100	Sangat Berhasil
Rata-Rata Capaian Sasaran (nilai mean)							100

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2021

Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas, dalam tahun 2021 ditargetkan 100%. Dalam hal ini telah diambil data dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya atau terealisasi 100% dan disusun dalam buku Dharmasraya, PDRB pengeluaran dan PDRB menurut lapangan usaha, namun terjadi keterbatasan dalam pencetakan buku (hard copy) sehingga hanya dilakukan publikasi soft copy melalui website. Penilaian capaian kinerja dapat diinterpretasi penilaian **SANGAT BERHASIL**.

Tahun 2019 dilakukan terobosan untuk melakukan penyediaan data secara up date data setiap waktu melalui pembuatan website rumah data <http://rumahdata.dharmasrayakab.go.id> yang dilakukan ditingkat nagari dengan launching Nagari Statistik di Nagari Sei Duo Kec. Sitiung, namun belum mampu mencapai seluruh nagari yang terkendala jaringan internet terintegrasi seluruh nagari.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 Sampai Tahun 2021



Gambar 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d 2021 dalam IKU Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2020 dengan tahun 2021 sama sama tercapai 100%, namun terdapat peningkatan kualitas penyediaan data. Publikasi tahun 2021 dilakukan dalam bentuk softcopy melalui website. Tahun 2021 dilakukan dengan melakukan penyusunan detail dalam buku PDRB menjadi PDRB menurut produksi dan PDRB menurut lapangan usaha sesuai Tahun 2020.

Peningkatan kualitas dilaksanakan tahun 2019 melalui terobosan untuk melakukan penyediaan data secara up date data setiap waktu melalui pembuatan website rumah data <http://rumahdata.dharmasrayakab.go.id> yang dilakukan ditingkat nagari dengan launching Nagari Statistik di Nagari Sei Duo Kec. Sitiung, namun belum mampu mencapai seluruh nagari yang terkendala jaringan internet terintegrasi seluruh nagari. Nagari Statistik di Kab. Dharmasraya saat dilaunching merupakan satu-satunya di Indonesia yang melakukan up date data statistic setiap saat dan menjadi pilot project di Propinsi Sumatera Barat.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan RENSTRA

Tabel 3.26
Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Dinas
Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Persentase
Ketersediaan Data Statistik Sektoral

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Tahun 2020	RENSTRA 2016-2021	Deviasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	100%	100%	0%

Kondisi pencapaian sampai tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dharmasraya Tahun 2016-2021 sebesar 100% atau dengan kata lain sudah sesuai target.

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga dalam meningkatkan persentase ketersediaan data statistik sektoral menggunakan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Kekurangan staf dilaksanakan dengan memanfaatkan tenaga Non PNS. Sumber daya sarana dan prasarana sementara mencukupi untuk melaksanakan tugas. Kekurangan kendaraan disiasati dengan meminjam kendaraan operasional ketika membutuhkan pelaksanaan ke lapangan. Peningkatan kualitas dalam keberhasilan sasaran strategi ini didukung oleh adanya tenaga ahli programmer Non PNS yang direkrut tahun 2018 dan mulai aktif tahun 2019 yang mampu membuat website rumah data <http://rumahdata.dharmasrayakab.go.id> yang akan terus disempurnakan.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program yang menunjang keberhasilan strategi ini yaitu program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah dengan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah dan program



Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah dengan kegiatan Pengembangan Meta Data Statistik Daerah.

Permasalahan yang ditemui untuk mencapai target dalam strategi peningkatan persentase ketersediaan data statistik sektoral adalah sebagai berikut:

1. Beragamnya jenis data yang dibutuhkan oleh masing-masing OPD
2. Data yang dimiliki belum ter up-date setiap waktu dari sumber data

Apapun upaya penyelesaian yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target dalam strategi peningkatan persentase ketersediaan data statistik sektoral adalah:

1. Pembuatan website rumah data agar dapat dilakukan up-date setiap waktu dari sumber data, namun masih terus dilakukan penyempurnaan keberagaman jenis data
2. Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat dan giat menggali dan mempelajari agar proses rumah data dapat lebih sempurna.

➤ **Sasaran Strategis :**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2021

Sasaran strategis keempat yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dalam tahun 2021 ditargetkan Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai BB, dan telah berhasil mencapai nilai BB tersebut atau tercapai 100%. Penilaian capaian kinerja dapat diinterpretasi penilaian **SANGAT BERHASIL**.

Tabel 3.27**Perbandingan Target dengan Realisasi dalam IKU Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya	BB	BB	100%	Sangat Berhasil
	Rata-Rata Kelompok Tertimbang					100	Sangat Berhasil
	Rata-Rata Capaian Sasaran (nilai mean)						100

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 Sampai Tahun 2021

Jika dibandingkan realisasi Tahun 2018 dengan tahun 2021 sama-sama tercapai 100%, namun terdapat peningkatan kualitas penyajian laporan akuntabilitas kinerja. Peningkatan kualitas ini meningkat karena dukungan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang membimbing penyusunan LAKIP dengan berbagai metode dan cara pendampingan sehingga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 3.28**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 s.d Tahun 2021 dalam IKU Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							
			Target				Realisasi			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya	C	B	BB	BB	C	B	BB	BB

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan RENSTRA

Kondisi pencapaian sampai tahun 2021 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target dalam Indikator Kinerja Utama dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dharmasraya Tahun 2016-2021 adalah BB

Tabel 3.29

Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dalam IKU Hasil Penilaian AKIP Diskominfo oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
			Tahun 2021	RENSTRA 2016-2021	Deviasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya	BB	BB	0%

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis keempat dalam meningkatkan hasil penilaian AKIP Diskominfo oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya menggunakan tenaga yang ada melalui Kasubag. Keuangan, Program dan Perencanaan dan Staf Pengelola Program dan Perencanaan dengan bimbingan dan dukungan dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah.

Adapun biaya yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis ini menggunakan biaya yang berasal dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta memanfaatkan sumber daya sarana dan prasarana computer, laptop serta printer yang ada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Program yang menunjang keberhasilan strategi ini yaitu program **Adiministrasi Perkantoran** dengan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan serta Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

Permasalahan yang ditemui untuk mencapai target dalam strategi meningkatkan hasil penilaian AKIP Diskominfo oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya adalah keterbatasan kemampuan petugas dalam menyusun buku LAKIP. Apapun upaya penyelesaian yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah dalam proses penyusunan Buku LAKIP

Realisasi Keuangan Tahun 2021

Tabel 3.30

Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
				(Rp)	(Rp)	
1.	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan				
		Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan				
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat nagari	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan Media Massa	8.668.750	8.668.750	97,74%
			Pembinaan dan Peningkatan Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	8.668.750	8.668.750	100%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	785.881.500	783.686.636	97,49%
			Pembangunan Jaringan antar Organisasi Pemerintah Daerah	691.152.500	689.133.636	99,71%
			Pemeliharaan Jaringan antar OPD	94.729.000	94.553.000	99,81%
			Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	55.225.450	55.134.251	99,07%
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Prasarana Komunikasi	55.225.450	55.134.251	99,83%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
				(Rp)	(Rp)	
	Meningkatnya pengamanan informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah	19.750.116	19.750.116	100%
			Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	19.750.116	19.750.116	100%
	Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	28.694.350	28.526.500	99,73%
			Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	2.451.500	2.451.500	100%
			Pengembangan Meta Data Statistik Daerah	26.242.850	26.075.000	99,36%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharma Raya				

Realisasi capaian kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun anggaran 2020 dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) indicator kinerja yang tidak dibiayai langsung, namun menggunakan pendanaan yang ada di sekretariat. Indicator kinerja tersebut adalah:

1. Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan, yang menggunakan keahlian programmer yang telah ada dan diberikan gaji oleh pemerintah daerah.
2. Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan, yang telah tercapai pada tahun 2015 dan konsultasi dilakukan oleh staf di bidang Komunikasi dan Informatika serta programmer yang sudah ada

- 
3. Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya, yang dilakukan penyusunan oleh Kasubag. Keuangan, Program dan Pelaporan beserta staf dan didukung oleh alat tulis kantor serta cetak yang berada di Sekretariat.

Inovasi Tahun 2021

Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan berbagai inovasi yaitu :

- a. Inovasi Nagasati yang merupakan Inovasi Nagari Statistik, dimana basic data di tingkat Nagari dilakukan integrasi untuk menuju Dharmasraya Satu Data. Pengintegrasian data langsung dari masyarakat melalui Pokja di Nagari pada tahun 2019 yang dimulai dari Nagari Sungai Duo dan dilanjutkan tahun 2021 ke Nagari Sitiung, Nagari Siguntur dan Nagari Gunung Medan.
- b. Inovasi Kecamatan Statitik yang merupakan tindak lanjut Nagari Statistik di tingkat Kecamatan yang dimulai dengan Kecamatan Sitiung di tahun 2021, dengan melakukan pengintegrasian data dari 4 (empat) Nagari di Kecamatan Sitiung.
- c. Inovasi Dharmasraya One Klik yang merupakan rangkaian integrasi web site dan layanan aplikasi public yang berada di seluruh OPD dengan berbasis android. Inovasi ini sudah selesai diintegrasikan dan masih dilakukan penyempurnaan dan segera dilakukan launching.

Penghargaan Tahun 2021

Penghargaan yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 ada 1 (satu) unit tingkat Nasional yaitu:

1. Badan Pusat Statistik Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai Inovasi Nagari Statistik untuk menuju Indonesia Satu Data yang diberikan di Padang, 28 Mei 2021.

Penghargaan yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun



2021 ada 1 (satu) unit tingkat Propinsi Sumatera Barat yaitu:

2. Gubernur Sumatera Barat sebagai Inovator Nagari Statistik Pertama di Sumatera Barat dan Indonesia yang diberikan di Padang, 28 Mei 2021.

Penghargaan yang diterima Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 ada 3 (tiga) unit tingkat Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Penghargaan Bupati Dharmasraya Nomor: 463/639/ DinsosP3APPKB/ 2021 atas partisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika meraih penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) tingkat “Pratama” tahun 2020 yang diberikan di Pulau Punjung, 28 Oktober 2021.
2. Palang Merah Indonesia Nomor: 009/01.04.18/PGM/XII/2021 kepada Dinas Komunikasi dan Informatika atas kontribusi dalam memfasilitasi tugas kemanusiaan PMI Kabupaten Dharmasraya, yang diberikan di Pulau Punjung, 31 Desember 2021.
3. Penghargaan Bupati Dharmasraya Nomor: 050/289/Bappeda-2021 Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika atas Inovasi Nagasati (Nagari Statistik) sebagai OPD Terinovatif Innovative Government Award Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021, yang diberikan di Pulau Punjung, 30 November 2021.

BAB IV PENUTUP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Dharmasraya disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis dan sistem akuntabilitas yang memadai.

Capaian kinerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021 secara umum sudah mencapai lebih dari 82,29% dan telah sesuai dengan capaian target dalam Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2021 secara umum sudah mencapai 94,60 %.

Langkah-langkah masa mendatang yang akan dilaksanakan agar dalam tahapan akhir RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu:

1. Pelaksanaan kerjasama dengan BPS dan penambahan pembentukan Nagari Statistik oleh programmer agar sumber data dapat memberikan data setiap saat untuk meningkatkan kualitas data statistic sektoral yang tepat untuk perencanaan pembangunan.
2. Penyempurnaan website Rumah Data dalam pelaksanaan Nagari Statistik dan link dengan seluruh aplikasi yang memberikan data di Kab. Dharmasraya.
3. Pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kemampuan SDM OPD dan SDM Nagari dalam pengisian berita di web masing-masing.
4. Mendorong Pemerintahan Nagari untuk melakukan pembentukan kelompok informasi masyarakat yang lebih aktif untuk meningkatkan peran masyarakat dalam diseminasi informasi.
5. Peningkatan bandwidth untuk peningkatan akses integrasi jaringan OPD dan atau penggunaan kerjasama Iconplus.
6. Pelaksanaan kerjasama dengan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN)



untuk mengamankan berbagai aplikasi yang digunakan pemerintah daerah Kab. Dharmasraya.

SAKIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka lakip ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi kepada publik. Oleh karena itu, SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya ini diharapkan akan menumbuhkan saran – saran dan kritik – kritik yang konstruktif terhadap eksistensi internal dan eksisistensi eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Dengan diterbitkannya SAKIP ini semestinya menjadi landasan fundamental bagi Dinas Kominikadsi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya untuk selalu konsisten dan berkelanjutan meningkatkan kualitas kinerjanya, sehingga dapat menghasilkan lulusan diklat yang berkualitas sikap, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dan professional serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya SAKIP ini disertai dengan harapan semoga akan menjadi landasan fundamental bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya untuk selalu meningkatkan kinerjanya dalam tahun – tahun mendatang.

LAMPIRAN

Lampiran 3.
Rekapitulasi Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
			Target	Realisasi	%		DPPA	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya transparansi pemerintah daerah dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	400.103.750	397.692.657	99,40%	
						Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	400.103.750	397.692.657	99,40%	
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	247.005.000	245.775.289	99,50%	
		Persentase Nagari yang memiliki website dan melakukan pembaruan informasi minimal 1 kali sebulan	100%	100%	100%					Biaya dilakukan oleh Nagari dan apabila dilakukan pembinaan oleh Dinas Kominfo dibiayai melalui konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Nagari	100%	21%	21%					Pembinaan hanya dilakukan kepada kelompok yang sudah terbentuk dengan pemanfaatan SDM yang konsen kelompok ini. Kebutuhan kendaraan menggunakan kendaraan operasional
		Persentase perangkat daerah	100%	100%	100%	Program : Aplikasi Informatika	678.251.300	677.332.400	99,86%	
						Kegiatan : Pengelolaan e-	678.251.300	677.332.400	99,86%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
			Target	Realisasi	%		DPPA	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang memiliki jaringan terintegrasi				government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
						Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	678.251.300	677.332.400	99,86%	
						Program : Informasi dan Komunikasi Publik	400.103.750	397.692.657	99,40%	
						Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	400.103.750	397.692.657	99,40%	
						Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	108.995.750	108.693.918	99,72%	
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	44.103.000	43.223.450	98,01%	
2.	Meningkatnya Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%	55%	55%	Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	52.234.250	50.608.350	96,89%	
						Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.234.250	50.608.350	96,89%	
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.234.250	50.608.350	96,89%	
3.	Meningkatkan ketersediaan data pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	100%	100%	100%	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral	118.339.500	117.873.300	99,61%	
						Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	118.339.500	117.873.300	99,61%	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	61.354.300	61.272.700	99,87%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Keterangan
			Target	Realisasi	%		DPPA	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Statistik Sektoral				
						Membangun Metadata Statistik Sektoral	19.529.000	19.389.600	99,29%	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	37.456.200	37.211.000	99,35%	
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Hasil penilaian AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika oleh Inspektorat	BB	BB	100%					Biaya administrasi umum perkantoran seperti ATK, cetak dan penggandaan atau konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

Lampiran 4.
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

NO	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Urusan : Wajib Bukan Pelayanan Dasar	4.441.739.646	4.281.676.353	96,40%
	Program : Penunjangg Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/Kota	3.192.810.846	3.038.169.646	95,16%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.906.290.600	1.850.993.833	97,10%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.906.290.600	1.850.993.833	97,10%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.605.450	115.305.905	99,74%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.012.000	2.011.000	99,95%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.328.900	1.272.700	95,77%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.697.000	10.642.000	99,49%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.240.000	8.209.300	99,63%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.327.550	93.170.905	99,83%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.262.796	1.043.958.658	91,39%
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.250.000	3.000.000	92,31%
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	736.084.984	649.518.058	88,24%
9	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.417.812	11.250.600	98,54%
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.510.000	380.190.000	97,11%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.652.000	27.911.250	97,41%
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.552.000	23.811.250	96,98%
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.100.000	4.100.000	100%
	Program : Informasi dan Komunikasi Publik	400.103.750	397.692.657	99,40%
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	400.103.750	397.692.657	99,40%
13	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	247.005.000	245.775.289	99,50%
14	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	108.995.750	108.693.918	99,72%
15	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	44.103.000	43.223.450	98,01%
	Program : Aplikasi Informatika	678.251.300	677.332.400	99,86%
	Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	678.251.300	677.332.400	99,86%
16	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	678.251.300	677.332.400	99,86%
	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektor	118.339.500	117.873.300	99,61%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	118.339.500	117.873.300	99,61%

NO	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	(%)
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	61.354.300	61.272.700	99,87%
18	Membangun Metadata Statistik Sektoral	19.529.000	19.389.600	99,29%
19	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	37.456.200	37.211.000	99,35%
	Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	52.234.250	50.608.350	96,89%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.234.250	50.608.350	96,89%
20	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.234.250	50.608.350	96,89%



PEMERITAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jl. Lintas Sumatera Telp. 0754 (451578) Sikabau Kode Pos (27573)
Website:dharmasrayakab.go.id e-mail : diskominfo.dharmasrayakab.go.id

KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR: 189.1/ /KPTS-DISKOMINFO/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisien penyelenggaraan pemerintah daerah serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, perlu dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dana Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan kegiatan Persandian di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan acuan bagi seluruh Bagian di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya untuk menetapkan rencana kinerja tahunan;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sikabau
pada tanggal 2022

KEPALA,

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19690829 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Dharmasraya sebagai laporan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 189.1/ /KPTS-DISKOMINFO/2022
TANGGAL : 2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021-2026

Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Pencapaian Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Meningkatnya sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi
2	Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	Meningkatnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik
3	Meningkatnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem informasi persandian	Meningkatnya pengamanan sistem informasi persandian	Aplikasi yang dilakukan asesment
			Meningkatnya Keamanan Pelayanan Pemerintah yang Berbasis Aplikasi	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital
5	Terwujudnya satu data Dharmasraya	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan Pembangunan	Persentase Data Statistik Sektoral
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		Jumlah Nagari Statistik
				Jumlah Kecamatan Statistik
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen area perubahan perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah
				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat
7	Meningkatnya profesionalisme ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan	Meningkatnya Kinerja ASN	Jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensi

KEPALA,

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IV d
NIP. 19690829 199009 1 001